

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata *effective* dalam bahasa Inggris berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer efektivitas didefinisikan menjadi ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektif disebut apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹

Kata efektif merupakan dasar dari kata efektivitas yang memiliki pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. *“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its*

¹ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.

effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).²

Langkah untuk mengevaluasi berjalannya sebuah organisasi, dapat dilakukan menggunakan efektivitas konsep. Konsep efektivitas merupakan salah satu faktor dalam menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk serta manajemen organisasi atau tidak. Pada bagian ini, efektivitas yaitu pencapaian tujuan sebuah organisasi menggunakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, selain itu ditinjau dari sisi (*input*) masukan, proses, maupun (*output*) keluaran. Pada bagian ini ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Kegiatan dianggap efisien jika dikerjakan secara benar serta sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara benar serta memberikan hasil yang bermanfaat.³

Efektivitas pada umumnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.⁴ Efektivitas itu sendiri merupakan ukuran yang memberikan deskripsi sejauh mana target dapat dicapai.⁵ Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi, penekanannya disamping pada hasil yang ingin

² Nasution, Sosiologi pendidikan, (Jakarta:Bumi aksara, 1983), 56

³ *Ibid.*, 4

⁴ Ibnu Hasan Muchtar, *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, 6.

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, 10.

dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan.⁶

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan, sasaran program dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditargetkan tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan. Efektivitas dipergunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program atau kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.

“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan).⁷

Menurut pengertian diatas, bahwa jika sesuatu hal mampu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan secara benar dan juga berhasil sehingga dapat dikatakan suatu hal tersebut sudah berjalan dengan efektif.

⁶ Ibnu Syamsi, Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen, (Jakarta. PT Bumi Aksara, 2012), 2

⁷ Moenir, H.AS, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Bumi Aksara. Jakarta. 2008), 166

b. Indikator Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya;
- b. Aspek rencana atau program, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.⁸

c. Rumus Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Apabila sebuah hasil perbandingan antara output aktual dengan target output ≥ 1 , maka dapat dikatakan bahwa efektivitas tercapai sedangkan jika hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.

⁸ Muasaroh, *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan. Program Pelaksanaan PNPM-MP*, (Universitas Brawijaya Malang, 2010), 13.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah merupakan penyediaan uang, menurut kesepakatan antara dua pihak yakni lembaga keuangan perbankan dengan nasabah. Pihak lembaga keuangan perbankan bersepakat dengan nasabah bahwa nasabah wajib membayar angsuran atau cicilan dengan jangka waktu yang telah disetujui beserta imbalan atau bagi hasilnya.⁹

Pembiayaan yang bersumber dari prinsip *syariah* merupakan kesepakatan yang berasal menurut hukum Islam antara lembaga keuangan dengan anggota agar dalam menjalankan pembiayaan di bisnis maupun kegiatan yang lainnya bisa dijalankan sesuai prinsip *syariah*.¹⁰

b. Prinsip-prinsip Pembiayaan Menurut *Syariah*

Pada pembiayaan syariah, prinsip-prinsip dibawah ini harus terdapat didalamnya yaitu:

- 1) Tidak diperbolehkan terdapat unsur riba.
- 2) Penetapan pemberian zakat.
- 3) Dilarang membuat barang dan jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam.
- 4) Menjauhkan diri dari kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat judi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*).

⁹ Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Garuhawanca, 2020), 56.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 3.

5) Memberikan asuransi Islam (*tafakul*).¹¹

3. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan memperjual belikan suatu barang dengan memberitahukan harga belinya ke pembeli kemudian pembeli membayarnya beserta tambahan harga sebagai keuntungan.¹² *Murabahah akad* jual beli antara bank dan nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan adanya penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.¹³

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up/* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁴

Murabahah adalah *akad* jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. *Akad murabahah* menjelaskan penjual (dalam hal ini

¹¹ Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2017), 44.

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 169.

¹³ Arifin, Johan dan Wardani, Eke Ayu, 2016, Islamic Corporate Social. Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan, Jurnal akuntansi dan auditing Indonesia Vol.20 No.1 Juni 2016, 37-46.

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Produk tersebut yang paling banyak digunakan oleh bank *Syariah* karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.¹⁵

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun-rukun *murabahah* antara lain:

1. *Ba'i* merupakan penjual sebagai seseorang yang memiliki barang
2. *Musyteri* merupakan pembeli sebagai seseorang yang akan membeli suatu barang tersebut
3. *Mabi'* merupakan barang yang akan diperjualbelikan
4. *Tsaman* merupakan harga
5. *Ijab Qabul* merupakan *akad* yang diucapkan oleh penjual dan juga pembeli pernyataan

Syarat-syarat *murabahah* yaitu:

1. Penjual menegaskan harga beli barang tersebut ke pembelinya
2. Kesepakatan yang pertama wajib sah menurut rukun yang sudah ditetapkan
3. Kesepakatan tidak boleh mengandung unsur riba
4. Bilamana terdapat cacat atas barang tersebut penjual wajib memberitahunya ke pembeli setelah terjadi transaksi pembelian

¹⁵ M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

5. Semua hal yang ada kaitannya dengan transaksi pembelian wajib disampaikan oleh penjual seperti misal pembelian tersebut dilakukan secara kredit atau utang.¹⁶

4. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Ilmu ekonomi menjelaskan bahwa sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera mempunyai makna khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti pada istilah fungsi kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Di Negara Amerika, sejahtera mengarah kepada uang yang dibayarkan dari pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPFE Usakti, 2011), 170.

atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Kasus pada beberapa penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kata sejahtera bersumber dari bahasa sansekerta *catera* yang mempunyai makna payung. Sedangkan dalam konteks yang agak luas kesejahteraan sendiri diartikan seseorang yang hidupnya dalam kesejahteraan yang artinya seseorang yang bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa takut, kebodohan, rasa khawatir oleh karenanya didalam menjalani kesehariannya dapat merasakan rasa aman, rasa tenang secara lahir dan juga batinnya.¹⁷

¹⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.¹⁸

Kesejahteraan merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹⁹

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

b. Konsep Kesejahteraan

Menurut perspektif Islam seluruh aktivitas perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun individu harus didasarkan pada tujuan kemaslahatan serta kebaikan manusia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan keluarga berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu

¹⁸ Sunarti dan Ali Khomsan, *Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan?*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012), 8.

¹⁹ Ibid., 9

keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus).

Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari : pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan psikologi, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. kelompok yang dikategorikan dalam hal ini penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I.

c. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar daripada individu atau keluarga itu sendiri. Jika kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi. Namun ukuran kesejahteraan antara individu atau keluarga satu dengan yang lain berbeda karena kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subyektif. Kesejahteraan keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah minimal mampu atau ketidakmampuan menjalankan ibadah, makan minimal dua kali sehari, pakaian lebih dari satu pasang, sebagian besar rumahnya bukan dari tanah, jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.²⁰

²⁰ <https://Bkkbn.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2021, pukul 21:48 WIB.

Menurut BKKBN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi menjadi 5 tahapan, yakni:

- 1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yakni keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar sebagai keluarga sejahtera I.
- 2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) yakni keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologis keluarga. Indikatornya yaitu dapat makan minimal dua kali dalam sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian, rumahnya yang layak meliputi dinding, atap dan lantai, jika sakit dibawa ke fasilitas kesehatan, anggota keluarga umur 7-15 masih bersekolah.
- 3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) yakni keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga dapat memenuhi kebutuhan social psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator keluarga sejahtera II yaitu melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, minimal satu kali seminggu mengonsumsi daging atau ikan atau telur, seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel baju baru dalam setahun, luas lantai rumah paling

kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas masing-masing, ada minimal satu orang anggota keluarga yang berpenghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin, pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan kontrasepsi.

- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya. Pada keluarga sejahtera III, kebutuhan fisik, sosial psikologis dan pengembangan telah terpenuhi. Indikatornya yakni keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal, memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv, internet.
- 5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, social psikologis dan pengembangannya dalam akuntabilitas diri telah terpenuhi. Indikatornya yakni keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan social, ada

anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan social
atau yayasan atau institusi masyarakat.²¹

²¹ <https://Bkkbn.go.id>, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 22:12 WIB.